THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND FUNCTIONS OF THE VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTION (LPMK) IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN KIRU-KIRU VILLAGE, SOPPENG RIAJA DISTRICT, BARRU REGENCY

Hj.Aidah; Nur Rahmi A

STIA Al Gazali Barru
aidah@algazali.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the duties and functions of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in implementing development in Kiru-kiru Village, Soppeng Riaja District, Barru Regency, and the factors that affect the implementation of the duties and functions of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in implementing development. in Kiru-kiru Village, Soppeng Riaja District, Barru Regency. This research uses descriptive qualitative research type, data sources consist of primary data and secondary data, data collection techniques include observation, interviews, and documentation: as well as data analysis techniques through data reduction, data presentation, and data conclusion / verification.The results showed that the implementation of the duties and functions of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in the implementation of development in Kiru-kiru Village has gone well. Meanwhile, the influencing factors are land ownership, lack of budget, weather, situation and conditions.

Keywords: Implementation of LPMK duties in development

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KIRU-KIRU KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi: serta teknik analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi yaitu kepemilikan lahan, kurangnya anggaran, cuaca, situasi dan kondisi.

Kata Kunci: Pelaksanaan tugas LPMK dalam pembangunan.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai salah satu unsur negara memiliki peranan dan fungsi yang amat penting yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat, fungsi pemerintahan tersebut mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sejalan dengan dinamika warga negaranya. Apabila dibuka kembali kebijakan otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini, maka nampak jelas bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiska, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah disatu sisi, dan disisi lain pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah (Yudi Suparyanto 2019: 18).

Otonomi daerah yang berorientasi kepada otonomi masyarakat ditandai denganadanyakemampuanyangdimiliki pemerintahan kelurahan dan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum. Menguatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatnya anggaran untuk membangun ditingkat kelurahan dan desa, baik yang bersumber dari swadaya masyarakat maupun sumber lainnya, membuat pembangunan semakin menggeliat. Di kelurahan atau desa selalu ada dua tokoh kepemimpinan yakni, tokoh informal dan tokoh formal. Tokoh informal merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan ikatan batin dengan masyarakatnya sehingga mempunyai pengaruh yang besar. Tokoh informal yang dominan misalnya tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh formal merupakan pemerintahan kelurahan atau desa mempunyai kekuatan hukum. Kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan peranannya untuk menggerakkan masyarakat dalam pebangunan desa.

(Rofii Adji Sayekti, 2018:5) menyatakan bahwa otonomi daerah

adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan, atau pemerintahan. Otonomi Daerah harus dilaksanakan untuk kepentingan dalam daerah sehingga bisa lebih menjamin kesejahteraan yang didapat oleh masyarakat dalam daerah. Selanjutnya prinsip Otonomi Daerah adalah nyata, artinya pada dasarnya kewajiban, tugas dan wewenang itu sudah ada. Hanya saja dengan adanya otonomi daerah itu diharapkan potensi daerah bisa lebih diperhatikan dan dikembangkan, dengan adanya aturan-aturan yang bisa langsung dibuat oleh daerahnya sendiri maka tentunya perkembangan daerah dapat lebih maju.

Terakhir, otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip yang bertanggung jawab. Otonomi daerah diberikan agar daerah bisa lebih menyejahterakan rakyat di daerah, sehingga semua aturan yang ada harus berdasarkan kebutuhan di daerah dan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab pada negara dimana daerah tersebut bernaung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa "Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

(Deny Nofriansyah, 2018:3) menyatakan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan organisasi masyarakat yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat juga merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan khususnya di Kelurahan, di mana mereka akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal.

Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai Tugas dan Fungsi:

a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c) Peningkatan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d) Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e) Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
g) Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
h) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
i) Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
j) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/ kelurahan dan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai kewajiban yaitu:

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
c) Mentaati seluruh peraturan perUndang-Undangan.
d) Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan
e) Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai berikut:

a) Peningkatan pelayanan masyarakat.
b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
c) Pengembangan kemitraan.
d) Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.
e) Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas, dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif. Kepengurusan lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian. Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan. Keanggotaan lembaga kemasyarakan adalah warga Negara Republik Indonesia.

Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakar dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Mayarakat (LPM) ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Disadari bahwa pembangunan di kelurahan telah dilakukan secara luas oleh pihak pemerintah, tetapi hasilnya dianggap belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan peran serta masyarakat dan lembaga yang menaungi

suatu kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru"

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berupaya menafsirkan makna dari data ini sehingga dapat membantu kita memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2013:13).

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan/mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Lokasi dan Waktu Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yakni bulan Desember 2022 s/d Pebruari 2022.

Jenis Dan sumber data.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, studi kepustakaan dan informasi yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian.

DIAGRAM ALIR PENELITIAN

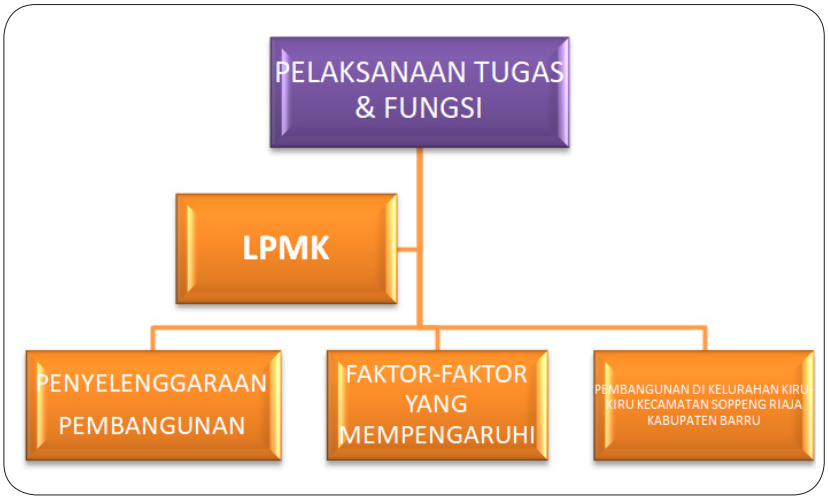

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari kegiatan observasi atau pengamatan yang penulis lakukan di Kelurahan Kiru-kiru yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru.

Pada tanggal 12-14 Januari 2022 tepatnya pada hari selasa sampai kamis penulis melakukan observasi di Kelurahan Kiru-kiru, penulis melihat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan perangkat kelurahan telah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan dengan program yang telah diberikan. Seperti adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru yaitu membuat jalan beton, membuat jalan setapak, melakukan pembangunan posyandu, dan melakukan pembebasan lahan dan kegiatan ini dilaksanakan oleh aparat Kelurahan bersama dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis juga memperoleh gambaran bahwa di Kelurahan Kiru-kiru terdapat beberapa bentuk tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan seperti mengadakan musyawarah, melakukan kerja bakti bersama dan juga menjalankan kontrol atas hasil pembangunan.

Selain hasil observasi diatas adapun hasil wawancara yang penulis lakukan yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru, peneliti memperoleh gambaran hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perangkat kelurahan dalam menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan maksimal dalam meningkatkan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

> *"aparat di kantor Kelurahan ini sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari jabatannya dalam proses peningkatan pembangunan" (Bapak*

Mardin M selaku Lurah Kiru-kiru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022).

"aparat perangkat kelurahan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu seperti melakukan kordinasi dengan lurah sedangkan perannya yaitu membantu lurah dalam semua kegiatan kelurahan". (Bapak Abidin Issa selaku wakil LPM yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022).

"kami sebagai aparat perangkat kelurahan sudah melaksanakan tugas dan fungsi kami sesuai dengan program yang telah diberikan". (Ibu Dahlia selaku ketua PKK Kiru-kiru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022).

"aparat kelurahan dalam menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masih kurang maksimal"(Ibu Hijeriah selaku staf Kelurahan Kiru-kiru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022.)

"masih perlunya ditingkatkan karena sampai sekarang aparat kelurahan beberapa kariawan honorer belum maksimal menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya". (Bapak Irwan selaku staf Kelurahan Kiru-kiru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022)

Dari hasil wawancara dapat simpulkan bahwa beberapa pegawai Kelurahan Kiru-kiru telah menjalankan tugasnya sesuai fungsioner masing-masing, namun juga perlu adanya peningkatan karena adanya beberapa pegawai honorer yang belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga adanya hambatan pembangunan pada Kelurahan Kiru-kiru.

"disini kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti jalan beton, membuat jalan setapak dan melakukan posyandu, dan selama proses kegiatan tersebut sampai sekarang belum ada kendala yang di alami" (Bapak Mardin M selaku Lurah Kiru-kiru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022)

"terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan kami disini melakukan pembuatan jalan beton, melakukan posyandu dilingkungan Kiru-kuru, selama melakukan kegiatan tersebut kami belum pernah mengalami kendala hanya saja anggaran yang kita gunakan yaitu berasal dari dana kelurahan dikarenakan adanya pademi covid-19" (Bapak Abidin Issa selaku wakil LPM yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022).

"disini kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan terkait pembangunan seperti pembuatan irigasi, untuk kendala yang dihadapi selama proses pembangunan tersebut yaitu kurangnya dana dari pemerintah"(Bapak Andi Hasaruddin selaku ketua RT yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas

maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pembangunan pada kelurahan Kiru-kiru ialah terletak pada anggaran, yang dimana anggaran tersebut kebanyakan dialihkan sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat seperti BLT dan itu adalah salah satu dampak dari covid-19 .

Untuk melakukan pembangunan maka diperlukannya dana agar proses pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu pemerintah memberikan sumber dana disetiap Kelurahan dimana dana tersebut digunakan dalam proses pembangunan.

> *"selama ini pemerintah memberikan anggaran dana pembangunan selama pelaksanaan pembangunan di kantor Kelurahan Kiru-kiru dan sumber dana tersebut sampai saat ini berjalan lancar" (Bapak Mardin M selaku Lurah Kiru-kiru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022).*
>
> *"pemerintah memberikan kami anggaran dana terkait pembangunan dan sampai saat ini belum ada kendala yang dihadapi" (Bapak Abidin Issa selaku wakil LPM yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022).*
>
> *"selama ini pemerintah memberikan anggaran dana selama pelaksanaan pembangunan namun untuk saat ini karena adanya pandemi covid-19 maka anggaran tersebut kurang lancar lagi" (Ibu Hasniah selaku staf Kelurahan Kiru-kiru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022) .*
>
> *"sumber dana yang diberikan oleh pemerintah berjalan lancar dan tidak ada kendala yang dihadapi" (Bapak Andi Muliyadi dan Bapak Wahidin selaku anggota LPM yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran atau dana pembangunan pada Kelurahan Kiru-kiru selama ini masih terbilang lancar meskipun pada saat awal adanya pandemik covid 19 yang menyebabkan sedikit hambatan di karenakan adanya pandemik Covid 19 yang di mana hingga saat ini masih menjadi pemersalahan di bidang kesehatan di tingkat negara hingga menimbulkan dampak hingga sampai ke pelosok yang ada seperti kelurahan Kiru-kiru yang perlu di utamakan oleh pemerintah setempat.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat dibutuhkan karena tanpa adanya masyarakat yang ikut serta dalam proses kegiatan tersebut maka pelaksanaan pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait bentuk-bentuk tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru.

"Bentuk dari tingkat partisipasi

masyarakat disini yaitu berupa melakukan gotong royong dan membantu dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan" (Bapak Abidin Issa selaku Wakil LPM yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022).

"bentuk dari partisipasi masyarakat disini yaitu seperti menyetujui adanya pembangunan dan ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut" (Bapak Mardin M selaku Lurah Kiru-kiru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022).

"kami disini ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dikelurahan dengan bentuk melakukan kerjasama" (Ibu Dahlia selaku ketua PKK yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022).

"kami ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan seperti mengadakan musyawarah, melakukan kerja bakti bersama dan juga menjalankan kontrol atas hasil pembangunan"(Bapak Wahidin selaku anggota LPM yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dikelurahan yaitu mengadakan musyawarah dan melakukan kerja bakti bersama, masyarakat juga ikut berpastisipasi dalam kegiatan pembangunan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Pada setiap pelaksanaan tugas tentunya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu:

"faktor yang menghambat proses pembangunan disini yaitu situasi dan kondisi"(Bapak Mardin M selaku Lurah Kiru-kiru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2022).

"hambatan dalam kegiatan pembangunan yaitu berupa pembebasan tanah dan juga cuaca" (Bapak Abidin Issa selaku wakil LPM yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022).

"faktor yang dapat menghambat proses kegiatan pembangunan disini berupa kepemilikan lahan dan juga pembebasan tanah" (Bapak Andi Muliyadi selaku anggotra LPM yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022).

"yang dapat menghambat proses kegiatan pembangunan di Kelurahan

ini seperti kurangnya anggaran" (Bapak Wahidin selaku anggota LPM yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022).

"faktor yang dapat menghambat proses pembangunan seperti cuaca, keterlambatan bahan dan kurangnya dana" (Bapak Ariyono selaku ketua RT 01 dan Bapak Andi Hasaruddin selaku ketua RT 03 yang diwawancarai pada tanggal 15 januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat proses pembangunan ialah kepemilikan lahan, situasi dan kondisi, dan kurangnya anggaran.

A. Pembahasan.

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-Kiru kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan dapat diketahui dengan melihat seberapa jauh perangkat kelurahan telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dimana aparat tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik.

Pada penelitian ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan sudah berjalan dengan baik dikarenakan perangkat kelurahan telah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan dengan program yang telah diberikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru seperti membuat jalan beton, membuat jalan setapak, melakukan pembangunan posyandu, dan melakukan pembebasan lahan.

Untuk melaksanakan pembangunan maka dibutuhkan anggaran dana dimana anggaran dana tersebut dapat digunakan untuk menyediakan peralatan maupun bahan selama proses pembangunan tersebut. Adapun sumber dana pembangunan yang digunakan yaitu bersumber dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembangunan dikelurahan Kiru-kiru berjalan dengan baik dimana anggaran pembangunan tersebut dibiayai oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena tanpa adanya masyarakat yang ikut serta dalam proses pembangunan maka pelaksanaan pembangunan tersebut

tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu dibutuhkannya partisipasi masyarakat atau keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan guna untuk mempermudah dan memperlancar proses kegiatan pembangunan tersebut serta dapat tercapainya tujuan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa terdapat beberapa bentuk-bentuk tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan seperti mengadakan musyawarah, melakukan kerja bakti bersama dan juga menjalankan kontrol atas hasil pembangunan. Berdasarkan pernyataan ini maka dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru sudah berjalan dengan baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan sangat penting dilaksanakan karena dengan pelaksanaan ini maka penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu:

1. Kepemilikan Lahan

   Permasalahan lahan menjadi faktor penting untuk diselesaikan sebelum dimulainya suatu pekerjaan, tanah yang belum bebas akan dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan termasuk pelaksanaan pembangunan bahkan menyebabkan proses pembangunan tidak dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dimana permasalahan pembebasan lahan dapat terjadi karena terdapatnya perbedaan patokan nilai harga antara pemilik tanah dan pemerintah.

2. Kurangnya Anggaran

   Aggaran dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan karena merupakan proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dimana apabila jumlah anggaran tidak mencukupi maka dapat menyebabkan tidak terlaksananya proses pembangunan tersebut,

hal ini dapat terjadi dikarenakan kesalahan dalam perencanaan anggaran.

3. Cuaca

   Faktor cuaca menjadi salah satu hambatan pelaksanaan pembangunan seperti halnya cuaca saat sedang hujan maka hal ini dapat membuat pekerjaan atau proses pembangunan terhambat sehingga pembangunan tidak terselesaikan dengan tepat waktu.

4. Situasi dan Kondisi

   Situasi dan kondisi merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan dikarenakan apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan maka dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pemantauan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Kiru-kiru terkait dengan pelaksanaan pembangunan seperti melakukan atau membuat jalan beton, jalan setapak dan juga mengadakan pembangunan posyandu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Kiru-kiru yaitu kepemilikan lahan, kurangnya anggaran, cuaca, situasi dan kondisi.

Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada aparat di kantor kelurahan Kiru-kiru agar aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan, mengaktifkan lembaga-lembakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
2. Disadarkan kepada anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Kiru-kiru agar aktif melakukan koordinasi perencanaan

pembangunan, melakukan kegiatan pembangunan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada dan juga melakukan kerjasama baik antara pihak pemerintah kelurahan dengan masyarakat serta pemuda yang ada di kelurahan Kiru-kiru.

DAFTAR PUSTAKA

Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan.* PT. Rineka Cipta. Jakarta

Hasan,Muh.2019. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Taman Ilmu. Makassar.

Handani,Sri. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam PengembanganUMKM di Wilayah Pesisir*. Scopindo. Surabaya

Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-pokok Organisasi Modern.* Bina Ilmu. Jakarta

M.Anwas,Oos. 2019. *Pemberdayaan Mayarakat di Era Global*. Alfabeta. Bandung.

Mardikanto, Toto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat.* Kencana. Jakarta.

Maryani, Dedeh. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat.* CV Budi Utama. Yogyakarta.

Mahi,Ali Kabul. 2017.*Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana. Jakarta.

Nofriansyah, Deny. 2018. *Buku Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. CV Budi Utama. Yogyakarta

Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru 2019.

Sayekti, Rofii Adji. 2018. *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Cempaka Putih. Yogyakarta

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta. Bandung

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods).* Alfabeta. Bandung

Suprihatini, Amin.2018.*Pemerintahan Desa dan Kelurahan* .Cempaka Putih. Yogyakarta

Suparyanto, Yudi..2019.*Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI*. Cempaka Putih. Jakarta

Utami, Ajeng Dini. 2019.*Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa.* Pustaka Indonesia. Yogyakarta

Jurnal dan karya ilmiah lainnya

Hijeriah. 2014. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),

Nuryasin, 2018. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa http://grobongan.go.id/info/artikel/579-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembangunan-desa. (Diakses pada 9 Agustus 2020)

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005. Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2006. Tentang Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.

Data Pendukung Lainnya,

Data kantor Kelurahan Kiru-kiru yaitu Sejarah Keluarahan Kiru-kiru, Visi Misi, Jumlah Pegawai, Struktur Organisasi Kantor Kelurahanj Kiru-kiru.